

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Dengan semakin berkembangnya suatu organisasi, maka pemimpin suatu organisasi tidak mungkin mengawasi secara langsung semua kegiatan-kegiatan dan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi. Karena keterbatasan itulah, semakin besar suatu organisasi maka semakin banyak pula kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak dalam (*intern*) suatu organisasi. Kesalahan-kesalahan dalam menjalankan operasional suatu organisasi pun semakin bertambah, baik sengaja maupun tidak disengaja.

Dalam suatu entitas yang masih mempunyai ukuran relatif kecil, dimana operasi atau kegiatan entitas dapat dikerjakan oleh beberapa orang, pimpinan masih dapat mengawasi dan mengendalikan segala yang terjadi dalam entitas tersebut secara langsung. Akan tetapi, apabila entitas tersebut sudah biasa menjadi besar dimana sebagian tugas dan wewenang pimpinan dilimpahkan kepada orang lain, maka pimpinan membutuhkan alat untuk mengadakan pengawasan untuk mengetahui kemajuan yang dicapai.

Untuk mengatasi keterbatasan ilmiah, diperlukan adanya suatu sistem dan prosedur yang baik dalam mengatur jalannya aktivitas suatu organisasi yang

dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap semua kegiatan organisasi terutama yang menyangkut aktiva, agar jangan sampai diselewengkan atau minimal memperkecil terjadinya penyalahgunaan harta suatu organisasi. Sistem ini biasanya dikenal dengan istilah sistem pengendalian intern (*internal control system*).

Dinas Kesehatan Kota Pontianak merupakan salah satu instansi pemerintahan dikota yang melakukan salah satu kegiatan pengadaan yaitu mengadakan kebutuhan farmasi untuk puskesmas-puskesmas yang ada dikota Pontianak, diantaranya pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukannya sistem perencanaan yang efektif, pengelolaan, pengawasan serta pengendalian yang baik terhadap pengadaan obat dan alat kesehatan supaya tidak terjadi penumpukan, kehilangan, dan kerusakan terhadap obat dan alat kesehatan tersebut. Memeriksa dan menghindari terjadinya penyelewengan yang dapat merugikan pihak Dinas Kesehatan sendiri beserta pihak lainnya.

Dalam mengusahakan kelancaran kegiatan operasional, Dinas Kesehatan kota Pontianak melakukan pengadaan untuk : kebutuhan farmasi, gudang umum, dan ruangan. Kebutuhan farmasi meliputi : obat dan alat kesehatan ; kebutuhan gudang umum meliputi : bahan makanan, bahan pembersih, bahan listrik, bahan linen dan bahan umum; sedangkan kebutuhan ruangan meliputi : inventaris kantor dan alat-alat tulis kantor.

Jenis pengadaan yang memerlukan perhatian lebih adalah atas kebutuhan farmasi terutama dalam obat-obatan dan alat kesehatan. Pengadaan obat dan alat kesehatan adalah suatu kegiatan mengadakan obat-obatan dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan. Teknis pelaksanaan pengadaan obat dan alat kesehatan difarmasi Dinas kesehatan Kota Pontianak, sebagai dasar hukumnya harus mengacu pada “ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan uraian pada Bab 1 (satu) pasal 1, ayat 1 (hal.2) yang isinya:

Ayat 1. Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Ayat 2. Kementerian/Lembaga/Satuan Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD).

Dan berdasarkan uraian Bab VI pasal 38 ayat 5 huruf d (hal:41) yang isinya:

- d. Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Kegiatan pengadaan merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam memberikan pelayanan kesehatan dimana pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada agar tidak terjadi suatu kelebihan pada persediaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan pengadaan obat dan alat kesehatan yang dikelola dengan baik adalah untuk memperoleh obat dengan jenis dan jumlah yang tepat (sesuai kebutuhan), menjamin penyampaian yang cepat, tepat waktu, dan optimasi pengolahan persediaan obat melalui prosedur pengadaan atau permintaan yang baik. Hal ini dikarenakan pengadaan atas kebutuhan farmasi merupakan langkah awal bagi Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk dapat memberikan pelayanan dibidang kesehatan dalam hal pengadaan obat dan alat kesehatan untuk kebutuhan farmasi.

Berdasarkan Pepres N0 54 tahun 2010 ketentuan pasal 106 ayat (1) dan (2):

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik atau *E-Procurement*.

2. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *E-Tendering* atau *E-Purchasing*.

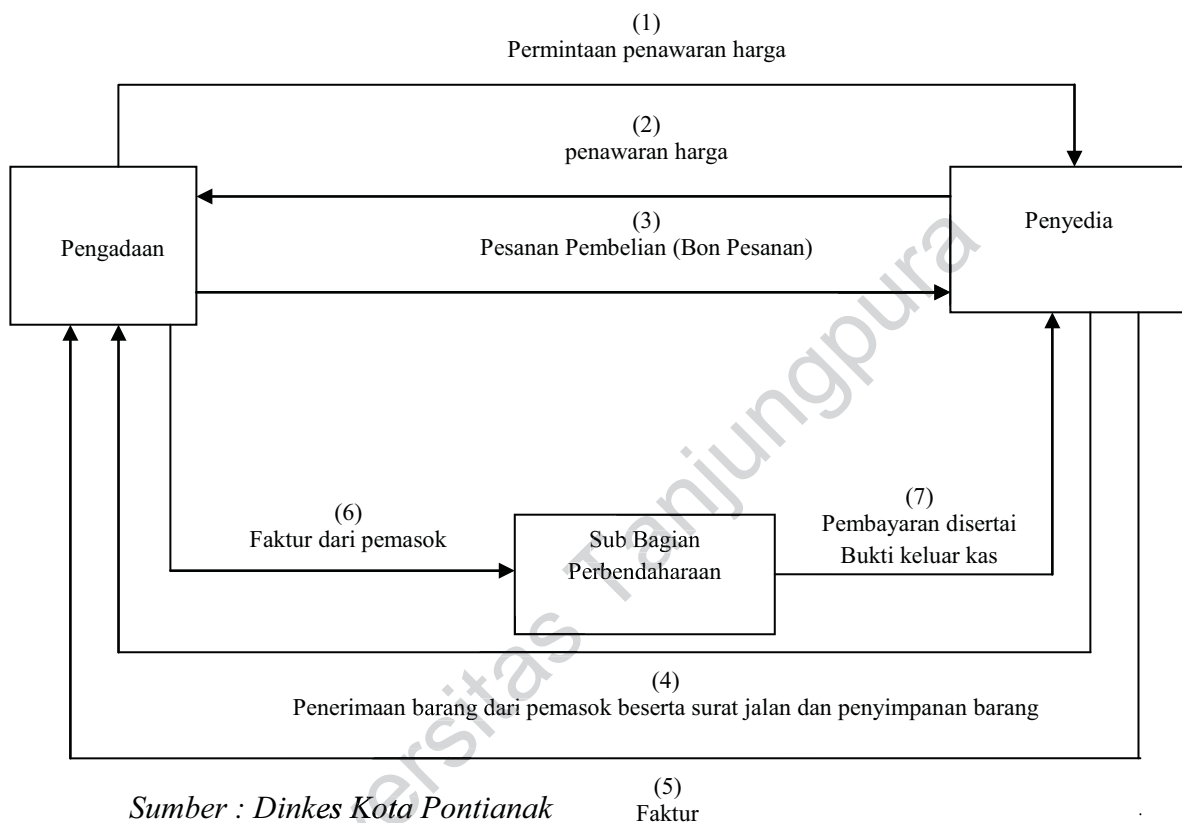
Pengadaan-pengadaan tersebut dilakukan secara tunai. Pengadaan secara tunai pada akhirnya mengakibatkan terjadinya aliran kas keluar kepada pemasok. Kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid sehingga mudah untuk disalahgunakan. Selain mempengaruhi kas, pengadaan juga menyebabkan persediaan kebutuhan farmasi di Dinas Kesehatan Kota Pontianak semakin banyak. Jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan penumpukan persediaan kebutuhan farmasi, yang pada akhirnya akan kadaluarsa (untuk obat-obatan).

Berdasarkan wawancara dengan kepala gudang Ibu Eka, mengatakan bahwa terdapat penumpukan khususnya obat-obatan. Hal ini disebabkan karena dokter pindah, sementara sebelumnya telah dipersiapkan dan juga disebabkan belum efektifnya kinerja disistem perencanaan pengadaan.

Berikut ini adalah alir data sistem pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk kebutuhan farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak:

**GAMBAR 1.1**

**BAGAN ALIR SISTEM DAN PROSEDUR DALAM PENGADAAN FARMASI  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK**



Selama ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun rencana pembelian kebutuhan obat dan alat kesehatan yang diperlukan berdasarkan bukti lembar pemakaian dan lembar permintaan obat dari puskesmas-puskesmas (LPLPO) kemudian Pejabat Pengadaan melakukan permintaan penawaran harga ke pemasok/penyedia tentang pembelian kebutuhan obat dan alat kesehatan. Pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak dokumen-dokumen yang digunakan dalam

proses pengadaan masih kurang, dimana surat pesanan pembelian hanya dibuat dua (2) rangkap saja. Rangkap pertama diberikan kepada pemasok atau penyedia sementara rangkap kedua dipegang oleh pihak pengadaan. Setiap fungsi yang berkaitan dengan siklus pengadaan, seharusnya menyimpan dokumen dan catatan yang digunakan dalam suatu siklus pengadaan. Hal ini berguna untuk mengantisipasi hilangnya salah satu dokumen atau catatan pada salah satu fungsi, sehingga pemeriksaan (*internal checking*) dapat tetap dilakukan. Pengarsipan dokumen dan catatan pada setiap fungsi merupakan cara pencegahan terjadinya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh salah satu fungsi.

Di Dinas kesehatan menerapkan sistem pembelian E-purchasing yaitu pembelian secara online dimana dokumen-dokumen pendukung transaksi dianggap tidak begitu penting karna pembelian melalui sistem tersebut dinilai efektif. Kurangnya dokumen pendukung dalam transaksi pengadaan menyebabkan pengendalian internal Dinas Kesehatan Kota Pontianak atas transaksi pembelian kebutuhan farmasi ini lemah karena sangat memungkinkan untuk terjadinya penyalahgunaan formulir untuk kepentingan yang dapat merugikan Dinas Kesehatan. Selain itu dapat terjadi penggandaan transaksi karena sulit untuk mengontrol formulir yang dikeluarkan.

Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern pada suatu organisasi dalam menunjang aktivitas pengadaan, maka penulis mengambil judul “ **Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan Untuk Kebutuhan Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak**”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat dilihat bahwa pentingnya suatu sistem dan prosedur yang mamadai dalam menunjang kegiatan atau prosedur suatu organisasi. Oleh karena itu, perlu diketahui sistem dan prosedur bagaimana yang baik dan cocok untuk diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apakah pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan obat dan alat kesehatan untuk kebutuhan farmasi pada Dinas kesehatan Kota Pontianak telah berjalan dengan efektif?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang berdampak pada keefektifan pelaksanaan sistem dan prosedur atas pengadaan obat dan alat kesehatan untuk kebutuhan farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak?



### **1.3. Pembatasan Masalah**

Agar permasalahan yang diteliti tidak menyimpang dari objek permasalahan yang telah ditentukan, dan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, maka dengan ini penulis melakukan pembatasan hanya terbatas pada sistem dan prosedur pengadaan obat dan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur pengadaan obat dan alat kesehatan untuk kebutuhan farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah memenuhi syarat-syarat sistem dan prosedur yang efektif.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang berdampak pada efektifitas sistem dan prosedur pengadaan obat dan alat kesehatan untuk kebutuhan farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan membandingkannya dengan praktek yang terjadi pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak sehingga dapat melatih daya analisis, keterampilan meneliti dan menulis. Khususnya yang berhubungan dengan masalah sistem dan prosedur pengendalian intern. Selain itu, dapat digunakan juga untuk mengetahui sejauh mana penerapan praktek akuntansi secara nyata dibandingkan dengan teori dan ilmu yang telah penulis dapat.

### 2. Bagi Pihak Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam upaya penyempurnaan kembali sistem dan prosedur pengadaan obat dan alat kesehatan untuk kebutuhan farmasi dimasa yang akan datang.

### 3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai sistem dan prosedur dalam pengadaan kebutuhan farmasi, serta menjadi bahan referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.